

**SISTEM PENDIDIKAN KOLONIAL BELANDA DI INDONESIA
TAHUN 1900 – 1942**

*DUTCH COLONIAL EDUCATION SYSTEM IN INDONESIA
YEAR 1900 - 1942*

Fajar Shidiq Sofyan Heru, Sumardi, Nurul Umamah
Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: sumardihum@ymail.com

ABSTRAK

Pendidikan pada masa penjajahan Belanda pada awalnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Belanda di Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya pendidikan digunakan sebagai alat penjajah untuk mencetak tenaga kerja murah atau pegawai rendahan yang sangat diperlukan untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Sistem pendidikan jaman kolonial Belanda merupakan sistem yang rumit karena penjenisannya cukup banyak sebagai realisasi dari diskriminasi sistem pendidikannya. Tujuan dan kebijakan politik pendidikan yang dibuat dan diterapkan oleh Belanda semata-mata hanya untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Pendidikan kolonial tidak hanya berakibat negatif bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga memberikan dampak positif karena setelah penjajahan Belanda di Indonesia berakhir dan Indonesia mencapai kemerdekaan sebagian penduduk di Indonesia khususnya di Jawa sudah tidak menderita tuna aksara atau buta huruf lagi. Karena penduduk Indonesia telah lama mengenal pendidikan atau sekolah. Pendidikan kolonial juga melahirkan tokoh-tokoh pergerakan nasional dan tokoh-tokoh pendidikan yang berjiwa nasionalis dan patriotis untuk memperjuangkan nasib bangsa Indonesia.

Kata Kunci : Sistem pendidikan, kolonial Belanda

Abstract

Education in the Dutch colonial period at the first time is only used to fulfill the needs of the Dutch in Indonesia. In the next development, education is used as a mean for colonialist to creat cheap workers or indispensable petty employess for Dutch companies. The colonial education system of the dutch is a complex one because it has a lot of kinds as the realization from the discrimination of educational system. The purpose and politics policy of education has been made and implemented by the dutch only for the self interest of the dutch government. Colonial education is not only give a negative effect for Indonesian people, but also give a positive effect because after the Dutch colonization in Indonesia was over and Indonesia get independence, most of Indonesian people especially in Java had not suffered illiteracy anymore. It is because they had known about education or school. The colonial education also create the national activation figures and educational figures having nationalist and patriotic soul to fight for the fate of Indonesia nation.

Keywords : Educational System, Dutch Colonial

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan usaha untuk mengantar manusia menemukan pribadi sebagai seorang dewasa yang dapat berdiri sendiri dan bertanggungjawab, melalui pendidikan masyarakat dapat bebas mengembangkan cipta, rasa, dan karsanya supaya dapat berbakti kepada

Nusa, Bangsa, dan seluruh umat manusia. Sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh penjajah memiliki sifat berbeda karena mempunyai tujuan tertentu. Pada waktu penjajahan Belanda terjadi eksploitasi jiwa dan raga karena pendidikan pada waktu itu hanya semata-mata untuk kepentingan penjajah (Mangunpranoto,

1978:3). Sistem pendidikan kolonial yang pernah berlaku di Indonesia mempunyai karakteristik yang spesifik, yaitu adanya jurang pemisah antara penjajah dan yang terjajah. Masing-masing (penjajah dan yang terjajah) merupakan lapisan dalam masyarakat (Umamah, 1997:1). Ciri lain yang paling mencolok dari sistem masyarakat kolonial adalah adanya diskriminasi peranan antara golongan Eropa dan golongan Bumiputra. Kedatangan Bangsa Belanda ke Indonesia pada mulanya tidak ada kaitannya dengan bidang pendidikan yang justru akan menghabiskan dana, sedangkan dalam masyarakat Indonesia pada waktu itu sudah dikenal sistem pendidikan model pesantren (Salindri, 1996:15).

Pada tahun 1900 C. Th. Van Deventer mengungkapkan gagasannya yaitu Politik Etis. Pendidikan tahun 1900 merupakan kelanjutan dari pendidikan pada jaman VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*). Tujuan pendidikan sedikit berbeda, karena disesuaikan dengan tuntutan jaman. Pada jaman VOC pendidikan bertujuan untuk mencetak tenaga buruh kasar dan elite sosial, sedangkan pendidikan setelah politik etis bertujuan untuk mencetak tenaga kerja terdidik untuk dijadikan sebagai tenaga kerja kelas menengah dan untuk menciptakan elite sosial. Segala macam tujuan dan kebijakan politik yang dibuat dan diterapkan oleh Belanda semata-mata hanya untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda.

Secara tematikal, fokus permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah (1) kebijaksanaan sistem pendidikan kolonial Belanda di Indonesia tahun 1900 – 1942; (2) komponen-komponen sistem pendidikan jaman kolonial Belanda di Indonesia tahun 1900 – 1942; (3) penyelenggaraan pendidikan kolonial Belanda di Indonesia tahun 1900 – 1942. Segi tempat (spasial) penelitian ini adalah negara Indonesia. Mengingat negara sasaran atau target penjajahan yang dilakukan oleh Belanda adalah Indonesia. Segi waktu (temporal) penelitian ini adalah dimulai pada tahun 1900 sampai tahun 1942.

Permasalahan yang dibahas adalah:

- 1) Bagaimana kebijaksanaan sistem pendidikan kolonial Belanda di Indonesia tahun 1900 – 1942?
- 2) Bagaimana komponen-komponen sistem pendidikan jaman kolonial Belanda di Indonesia tahun 1900 – 1942?
- 3) Bagaimana penyelenggaraan pendidikan kolonial Belanda di Indonesia tahun 1900 – 1942?

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis sistem pendidikan kolonial Belanda di Indonesia tahun 1900 – 1942.
- 2) Untuk mendeskripsikan komponen-komponen sistem pendidikan kolonial Belanda di Indonesia tahun 1900 – 1942.
- 3) Untuk mendeskripsikan penyelenggaraan kebijaksanaan sistem pendidikan kolonial Belanda di Indonesia tahun 1900 – 1942.

Penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat diantaranya:

- 1) Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan sejarah mengenai sistem pendidikan kolonial Belanda yang pernah diberlakukan di Indonesia pada tahun 1900 – 1942;
- 2) Bagi pembaca, dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai sistem pendidikan kolonial Belanda yang pernah diberlakukan di Indonesia pada tahun 1900 – 1942 serta sebagai bahan referensi dalam pembelajaran sejarah.;
- 3) Bagi Almamater FKIP Universitas Jember, penelitian ini merupakan wujud kongkrit pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma penelitian dan dapat menjadi tambahan koleksi kepustakaan Universitas Jember.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari proses heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dalam penelitian ini

penulis menggunakan pendekatan sosiologi ekonomi. Peneliti menggunakan pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi akan meneropong segi-segi sosial peristiwa yang dikaji, misalnya golongan sosial mana yang berperan, serta nilai-nilainya, hubungan dengan golongan lain, konflik berdasarkan kepentingan, ideologi, dan lain sebagainya yang sangat berhubungan dengan judul (Kartodirdjo, 1992:4). Lebih tepatnya lagi proses analisis kajian ini menggunakan pendekatan sosiologi pendidikan yang merupakan bagian dari sosiologi. Vembriarto (1993:4-11) menyatakan bahwa Sosiologi pendidikan adalah sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental dan merupakan sosiologi yang khusus menyelidiki struktur dan dinamika proses pendidikan.

Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi pendidikan dan untuk mempertajam hasil analisis dari penggunaan pendekatan tersebut maka digunakan juga teori struktur fungsional. Radcliffe Brown dalam Tamburaka (1999:95) menjelaskan bahwa komponen atau unit-unit struktur sosial dalam teori struktur fungsional adalah manusia-manusia yang mempunyai peranan dan posisi dalam struktur sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekolah-sekolah pada jaman kolonial Belanda diorganisir secara hierarkis menurut umur dan tingkatan tertentu berdasarkan pada batas perkembangan tertentu yang sesuai dengan kepentingan pemerintah. Seseorang tidak bisa dengan sendirinya menentukan pilihannya sesuai dengan potensi dan cita-citanya. Hal itu berakibat pendidikan yang berkembang bukanlah merupakan tuntutan lokal, tetapi mencerminkan kepentingan kolonial.

A. KEBIJAKSANAAN SISTEM PENDIDIKAN KOLONIAL BELANDA DI INDONESIA TAHUN 1900-1942

Politik pendidikan kolonial Belanda yang diterapkan di Indonesia mempunyai beberapa ciri-ciri pokok. Ciri-ciri umum politik pendidikan kolonial tersebut meliputi: (1) gradualisme, yaitu pemerintah kolonial Belanda sengaja bersikap lamban dalam melakukan perubahan pendidikan, (2) dualisme, yaitu menekankan perbedaan yang tajam antara pendidikan untuk bangsa Belanda dan untuk rakyat pribumi, (3) kontrol sentral yang kuat, yaitu segala kebijakan dalam hal pendidikan diatur oleh Gubernur Jenderal atau Direktur Pendidikan yang bertindak atas nama atasannya, (4) keterbatasan tujuan, yaitu peranan sekolah hanya untuk menghasilkan dan mencetak pegawai rendahan, (5) prinsip konkordansi, yaitu menjaga agar sekolah-sekolah di Indonesia mempunyai kurikulum dan standar yang sama dengan sekolah-sekolah di negeri Belanda, dan (6) tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis, yaitu masing-masing sekolah berdiri sendiri tanpa ada hubungan organisasi antara sekolah satu dengan yang lain sehingga tidak ada jalan untuk bisa melanjutkan ke sekolah yang jenjangnya lebih tinggi (Salindri, 1996:28). Ciri-ciri umum tersebut merupakan sistem pendidikan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda dan sudah diterapkan mulai pertama kali munculnya pendidikan Barat di Indonesia hingga akhir penjajahan Belanda di Indonesia. berikut akan dijelaskan secara lebih mendalam mengenai ciri-ciri umum politik pendidikan kolonial Belanda di Indonesia.

1. Kebijakan Sistem Pendidikan Kolonial Pada Masa

Willem Rooseboom (1899 – 1904)

Willem Rooseboom adalah Gubernur Jenderal yang menyetujui dan meresmikan pusat kursus bahasa Belanda untuk memperluas penggunaan bahasa Belanda di kalangan Bumiputera dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan agar supaya masyarakat pribumi bisa lebih mudah memasuki pendidikan Barat yang pada akhirnya para lulusannya akan dipekerjakan dalam instansi pemerintahan Belanda.

2. Kebijakan Sistem Pendidikan Kolonial Pada Masa

Johannes Benedictus van Heutsz (1904 – 1909)

Van Heutz berusaha untuk menyebarluaskan pendidikan dalam skala yang lebih luas yaitu mencari tipe sekolah lain yang lebih sederhana dan lebih murah. Van Heutz mendirikan sekolah yang cocok untuk Bumiputera yaitu Sekolah Desa (*Volkschool*). Menurut Gubernur Jenderal Johannes Benedictus van Heutsz itulah tipe sekolah yang dirasa paling cocok. Pertama, sekolah ini murah dan dapat didirikan berdasarkan gotong royong, tanpa pembiayaan sedikit pun dari pemerintah. Kedua, sekolah ini menjadi bagian integral dari masyarakat desa yang memandangnya sebagai miliknya. Ketiga, sekolah yang mempunyai kurikulum ini tidak akan mengasingkan anak dari kehidupan agraris di desanya.

3. Kebijakan Sistem Pendidikan Kolonial Pada Masa

Pemerintahan A.W.F Idenburg (1909 – 1916)

Gubernur Jenderal Alexander Willem Frederik Idenburg mempunyai kebijakan yaitu ingin menyatukan sekolah yang pada awalnya lepas dan tidak berhubungan satu dengan yang lain menjadi satu kesatuan yang bulat dan sistematis karena pada tahun 1910 mulai disadari bahwa tidak ada hubungan antar sekolah untuk anak pribumi. Untuk itu Gubernur Jenderal Alexander Willem Frederik Idenburg mengirim surat kepada menteri jajahan tentang rencananya tersebut (Nasution, 1995:32-33).

4. Kebijakan Sistem Pendidikan Kolonial Pada Masa

Pemerintahan Johan Paul van Limburg Stirum

(1916 – 1921)

Pada masa pemerintahan Johan Paul van Limburg Stirum *Volksraad* (Dewan Rakyat) dibentuk dan *Technische Hoogeschool te Bandoeng* (cikal bakal Institut Teknologi Bandung) didirikan. Gubernur Jenderal Johan Paul van Limburg Stirum lebih mendorong kehidupan demokrasi di Hindia Belanda.

5. Kebijakan Sistem Pendidikan Kolonial Pada Masa

Pemerintahan Dirk Fock (1921 – 1926)

Gubernur Jenderal Dirk Fock mengurangi peranan Penasihat Urusan Bumiputra yang merupakan lembaga penting dalam Politik Etis. Sebaliknya, peranan Polisi Rahasia (*Algemeene Recherchedienst*) semakin hebat. Masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dirk Fock dianggap sebagai akhir cita-cita Politik Etis.

6. Kebijakan Sistem Pendidikan Kolonial Pada Masa

Pemerintahan Andries Cornelis Dirk de Graeff

(1926 – 1931)

Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Andries Cornelis Dirk de Graeff Perimbangan anggaran belanja (*Balanced Budget*) dipertahankan meskipun hal ini akan mengakibatkan kemunduran kemakmuran rakyat dan terutama kemunduran kesehatan rakyat, pendidikan, dan lain-lain (Onghokham, 1999:43). Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Andries Cornelis Dirk de Graeff berdiri *Geneskundige Hoge School* (GHS) atau Sekolah Tinggi Kedokteran pada tahun 1928.

7. Kebijakan Sistem Pendidikan Kolonial Pada Masa

Pemerintahan Bonifacius Cornelis de Jonge

(1931 – 1936)

Pada masa pemerintahannya tingkat kesejahteraan masyarakat pribumi semakin merosot, karena pemerintah menekan biaya produksi dengan menurunkan upah buruh, hal ini menyebabkan pengangguran, kemiskinan, kelaparan dan masyarakat pribumi harus menanggung beban pajak yang berat. Selain itu kebebasan berkumpul dan mencetak sangat dibatasi, tetapi politik melindungi kepentingan para pengusaha dan golongannya sendiri tetap dijalankan (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008:62-63). Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Bonifacius Cornelis de Jonge, muncul *Onderwijs Ordonantie sekolah partikelir* atau disebut juga Ordonansi Sekolah Liar pada tanggal 17 September 1932. Gubernur Jenderal de Jonge juga menciptakan peraturan *Toezicht Ordonantie* (Ordonansi Pengawasan) pada tanggal 1 Oktober 1932. Dua tahun kemudian (1934) dikeluarkan

lagi peraturan yang disebut *Onderwijsverbod* (larangan mengajar).

8. Kebijakan Sistem Pendidikan Kolonial Pada Masa

Pemerintahan Alidius Warmoldus Lambertus Tjarda van Starckenborgh Stachouwer (1936 – 1942)

Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Alidius Warmoldus Lambertus Tjarda van Starckenborgh Stachouwer sifat pokok kolonial yang konservatif tetap dipertahankan, yaitu masyarakat yang diberi ciri dualistis, yakni kedudukan golongan penguasa kolonial tetap terjamin sedangkan golongan yang diperintah tetap dibatasi hak-haknya dan diperlakukan sebagai bangsa yang belum matang untuk berdiri sendiri. Indonesia yang pada mulanya menjadi negara polisi (*Politie Staat*) di tangan de Jonge akan diganti menjadi negara pegawai (*Beambten Staat*) di bawah Tjarda (Simbolon, 2007:387).

B. KOMPONEN-KOMPONEN SISTEM PENDIDIKAN PADA JAMAN KOLONIAL BELANDA DI INDONESIA TAHUN 1900-1942

Politik etis membawa pengaruh positif bagi pemerintah kolonial Belanda maupun rakyat bumiputra. Pengaruh politik ini antara lain ialah: (1) pendidikan lebih luas tidak hanya untuk lapisan atas saja tetapi juga lapisan bawah agar orang-orang Indonesia lambat laun dapat menduduki tempat-tempat yang sampai saat itu diduduki oleh orang-orang Belanda. Selain itu keuntungan dari pihak pemerintah kolonial Belanda lebih mudah mencari orang-orang yang lebih cakap dan terampil untuk dipergunakan sebagai pegawai bawahan di kantor-kantor dan perusahaan Belanda, (2) kemajuan bagi bahasa dan kebudayaan Barat, karena kesempatan untuk belajar bahasa Belanda diperluas. Tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Belanda merupakan kunci untuk memasuki dunia kerja pada waktu itu, (3) jumlah sekolah-sekolah diperbanyak dan tersebar di seluruh Indonesia (Depdikbud, 1984:61). Sistem pendidikan berupa sekolah-sekolah yang bercorak Barat diperbanyak oleh pemerintah kolonial Belanda supaya tiap orang Bumiputera mendapat

kesempatan untuk memperoleh pendidikan Barat sampai setinggi-tingginya.

Berikut akan dijelaskan mengenai komponen-komponen sistem pendidikan pada jaman kolonial Belanda di Indonesia yang terdiri dari tujuan pendidikan, kurikulum, peserta didik, pendidik atau guru, anggaran, dan lulusan atau tamatan.

Tujuan pendidikan selama periode kolonial memang tidak pernah dinyatakan secara tegas, tetapi dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pendidikan antara lain adalah untuk memenuhi keperluan tenaga buruh kasar untuk kepentingan kaum modal Belanda, di samping ada sebagian yang dilatih dan dididik untuk menjadi tenaga administrasi, tenaga teknik, tenaga pertanian, dan lain-lain yang diangkat sebagai pekerja-pekerja kelas dua atau kelas tiga. Kebutuhan akan tenaga kerja semakin meningkat karena disesuaikan dengan perkembangan Industri Belanda yang semakin lama semakin berkembang, maka dari itu pemerintah kolonial membutuhkan tenaga kerja terdidik untuk mengisi kursi kepegawaian pemerintah kolonial.

Mengenai mata pelajaran yang diajarkan, ada empat mata pelajaran yang diharuskan yaitu membaca, menulis, bahasa (bahasa Belanda wajib diajarkan), dan berhitung. Menurut Mudyaharjo (2006:266) sistem persekolahan pada jaman kolonial Belanda abad ke-20 terdiri atas tiga jenjang pendidikan, yaitu (1) pendidikan rendah (*Lagere Onderwijs*), yang dibagi menjadi 2, yaitu Sekolah Eropa dan Sekolah Bumiputra, (2) pendidikan lanjutan atau menengah (*Middlebaar Onderwijs*), (3) pendidikan tinggi (*Hooger Onderwijs*). Jadi bisa disimpulkan bahwa tiap jenjang pendidikan tersebut memiliki kurikulum yang berbeda. Pendidikan rendah memiliki kurikulum yang sama dalam hal mata pelajaran yang diajarkan yaitu membaca, menulis, bahasa, dan berhitung. Sedangkan kurikulum Pendidikan Menengah (*Middlebaar Onderwijs*) meliputi mata pelajaran fisika, kimia, matematika, geografi, biologi, kosmografi, menggambar garis, menggambar tangan, bahasa Jerman, bahasa Perancis,

bahasa Belanda, bahasa Inggris, botani, geometri, berhitung dan aljabar dan tata buku (hanya di AMS dan HBS, tidak diberikan di MULO). Kurikulum di Pendidikan Tinggi meliputi mata pelajaran pengetahuan alam, pertanian, mengukur tanah (kadaster), botani, biologi, etnologi, dan menggambar (meniru gambar).

Masyarakat Indonesia pada tahun 1920 dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: Golongan Eropa, Golongan Bumiputra, dan Golongan Timur Asing (Cina). Jadi sekolah-sekolah pada masa politik etis hingga berakhirnya jaman Hindia Belanda dimasuki oleh peserta didik yang berkebangsaan Belanda (mayoritas), Cina, dan Indonesia (minoritas).

Tenaga pendidik atau guru disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Tiap jenjang pendidikan mulai dari pendidikan rendah, menengah, dan tinggi tentu mempunyai kriteria dan syarat tertentu bagi guru untuk bisa mengajar di sekolah.

Pada tahun 1848 Gubernur Jenderal Van den Bosch diberikan kuasa untuk mempergunakan uang dari anggaran belanja negara sejumlah f 25.000 tiap tahun untuk mendirikan sekolah-sekolah bagi penduduk Pulau Jawa, terutama untuk mendidik calon-calon pegawai. Biaya yang disediakan pada tahun 1883 menjadi f 400.000 untuk Pulau Jawa saja, sedangkan untuk seluruh Indonesia sebesar f 1.196.000 (f = florin = gulden = rupiah Belanda) (Gunawan, 1986:13-14). ketika politik etis mulai dijalankan anggaran menjadi lebih besar dengan pemberian bantuan sebesar 40.000.000 gulden untuk menjalankan trilogi politik etis yang salah satunya adalah pendidikan.

Jumlah murid yang menamatkan sekolahnya dengan memperoleh ijazah lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah anak putus sekolah. Hanya 8 – 10 persen dari anak wanita dan sekitar 30 persen dari anak pria yang berhasil menamatkan pelajarannya.

Komponen-komponen sistem pendidikan pada jaman kolonial Belanda di Indonesia tahun 1900-1942 seperti tujuan pendidikan, kurikulum, peserta didik, pendidik atau guru, anggaran, dan lulusan atau tamatan merupakan

satu kesatuan yang sistematis antara satu dengan yang lainnya. Jadi antara komponen pendidikan satu dengan komponen pendidikan yang lain tidak bisa dipisahkan, karena merupakan motor penggerak pendidikan. Komponen-komponen pendidikan tersebut juga ada dalam pendidikan nasional di jaman setelah kemerdekaan seperti sekarang, hanya saja substansi dan orientasinya saja yang berbeda.

C. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KOLONIAL BELANDA DI INDONESIA TAHUN 1900-1945

Unsur pokok yang terkait dalam sistem pendidikan kolonial Belanda adalah ekonomi dan penjajahan. Karena adanya kepentingan itulah para penyusun konsep pendidikan tidak akan bisa melepaskan diri dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik pemerintah pusat yang ada di Nederland. Maka merupakan suatu kewajaran apabila sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah selalu berorientasi pada kepentingan kolonial Belanda (Jalaludin dalam umamah, 1997:16).

Perkembangan pendidikan yang cukup besar dalam perluasan pengajaran di Indonesia memungkinkan pemerintah kolonial untuk mempercepat tumbuhnya lembaga-lembaga yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Pada garis besarnya sistem persekolahan kolonial Belanda merupakan sistem yang rumit, karena penjenisannya cukup banyak sebagai realisasi dari diskriminasi sistem pendidikannya. Pendidikan kolonial Belanda terdiri dari tiga jenjang pendidikan, yaitu (1) Pendidikan Rendah (*Lager Onderwijs*) yang dibagi menjadi dua yaitu Sekolah Rendah Berbahasa Pengantar Bahasa Belanda, contohnya Sekolah Rendah Eropa/*Europe Lagere School* (ELS), Sekolah Cina Belanda/*Hollandsche Chinese School* (HCS), dan Sekolah Bumiputera Belanda/*Hollandsche Inlandsche School* dan Sekolah Rendah Berbahasa Pengantar Bahasa daerah atau Melayu, contohnya Sekolah Bumiputera Kelas Dua (*Inlandsche School-Tweede Klasse*), Sekolah Desa (*Volkschool*), dan Sekolah Peralihan (*Vervolgschool*); (2) Pendidikan Menengah (*Middlebaar Onderwijs*), contohnya MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*),

AMS (*Algemene Middlebare School*), dan Sekolah Tinggi Warga Negara/ *Hogere Burger School* (HBS); (3) Pendidikan Tinggi, contohnya Sekolah Tinggi Kedokteran/ *Geneskundige Hoge School* (GHS), Sekolah Tinggi Hukum/ *Rechts Hoge School* (RHS), dan Sekolah Tinggi Teknik/ *Technische Hoge School* (THS).

Sistem penyelenggaraan pendidikan yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat Indonesia khususnya Jawa tampak jelas adanya perlakuan yang berbeda, baik itu bagi anak-anak Eropa, Cina, maupun bagi pribumi sendiri. Hal ini dapat dilihat dengan dibedakannya kesempatan untuk memasuki sekolah bagi golongan atas (bangsawan) dan bagi golongan bawah (rakyat biasa). Untuk memasuki sekolah tertentu masih dipersulit dengan aturan-aturan yang memberatkan, ditambah lagi dengan biaya yang sangat mahal. Hal ini memang sengaja dilakukan oleh pemerintah untuk menghalangi rakyat biasa memasuki sekolah yang khusus untuk anak-anak Eropa, sehingga bagi rakyat Bumiputera terutama bagi rakyat biasa hanya bisa menduduki sekolah pada tingkat rendah saja. Adapun bagi golongan atas atau bangsawan dapat terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sampai perguruan tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijaksanaan sistem pendidikan kolonial Belanda di Indonesia tahun 1900-1942 memang tidak bisa terlepas dari (1) ciri-ciri pendidikan kolonial Belanda, seperti gradualisme, dualisme, kontrol sentral yang kuat, keterbatasan tujuan pendidikan, prinsip konkordansi, dan tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis; (2) kebijakan Gubernur Jenderal Belanda terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Segala masalah atau urusan pendidikan dimainkan dan diatur oleh pemerintah. Segala macam bentuk perubahan dalam hal pendidikan seberapa pun kecilnya harus melalui ijin Gubernur Jenderal. Antara tahun 1900 hingga 1942 terjadi beberapa pergantian kedudukan Gubernur Jenderal yang memimpin Hindia Belanda, jadi bisa disimpulkan bahwa terjadi pergantian

kebijakan juga dalam hal pendidikan karena setiap Gubernur Jenderal sudah pasti memiliki pemikiran yang berbeda tentang pendidikan dan pengajaran.

Sistem pendidikan kolonial Belanda di Indonesia tahun 1900-1942 memiliki komponen-komponen pendidikan yang terdiri dari (1) tujuan pendidikan; (2) kurikulum; (3) peserta didik; (4) pendidik atau guru; (5) anggaran pendidikan; (6) lulusan atau tamatan. Komponen-komponen tersebut harus ada dalam pendidikan karena merupakan sebuah sistem yang menggerakkan pendidikan sehingga pengajaran dapat berjalan.

Penyelenggaraan pendidikan kolonial Belanda di Indonesia tahun 1900-1942 memang tidak terlepas dari bentuk dan jenis-jenis sekolah jaman kolonial Belanda, yang terdiri dari Pendidikan Rendah (*Lager Onderwijs*) yang dibagi menjadi dua yaitu sekolah rendah berbahasa Belanda (ELS, HCS, dan HIS) dan sekolah berbahasa daerah atau lokal (sekolah bumiputera kelas dua, sekolah desa, dan sekolah peralihan), Pendidikan Menengah (*Middlebaar Onderwijs*) yang terdiri dari sekolah menengah umum (MULO dan AMS) dan sekolah tinggi warga negara (HBS), hingga Pendidikan Tinggi (GHS, RHS, dan THS). Pelaksanaan kebijaksanaan kolonial Belanda dilaksanakan secara konsekuen karena sampai awal abad kedua puluh Belanda tetap mengutamakan kepentingan pemerintahannya, walaupun telah lahir politik etis tetapi tetap terasa bahwa kepentingan rakyat asli tidak menjadi prioritas mereka.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut: (1) bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan sejarah mengenai sistem pendidikan kolonial Belanda yang pernah diberlakukan di Indonesia pada tahun 1900 – 1942; (2) bagi pembaca, dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai sistem pendidikan kolonial Belanda yang pernah diberlakukan di Indonesia pada tahun 1900 – 1942 sebagai bahan referensi dalam pembelajaran sejarah; (3) bagi Almamater FKIP Universitas Jember, penelitian ini merupakan wujud kongkrit pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu

Dharma penelitian dan dapat menjadi tambahan koleksi kepustakaan Universitas Jember. Demikianlah saran yang dapat penulis sampaikan dan semoga bermanfaat, sekian terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Depdikbud, 1984. *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat*. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.
- [2] Gunawan, A. 1986. *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- [3] Kartodirdjo, S. 1990. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- [4] Mangunpranoto, S. 1978. *Pendidikan Sebagai Sistem Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: PT. Inti Idaya Press.
- [5] Mudyahardjo, R. 2006. *Pengantar Pendidikan - Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [6] Nasution, S. 1995. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [7] Onghokham, 1999. *Runtuhnya Hindia Belanda*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- [8] Poesponegoro, M.D. dan Notosusanto, N. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia V – Jaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda*. Jakarta: Balai Pustaka.
- [9] Simbolon, P.T. 2007. *Menjadi Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- [10] Tamburaka, R. E. 1999. *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan Iptek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- [11] Vembriarto, St. 1993. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: PT. Grasindo.
- [12] Umamah, N. 1997. *Sistem Persekolahan Pada Masa Kolonial Belanda di Indonesia*.
- [13] Salindri, D. 1996. *Akibat Politik Pendidikan Belanda Bagi Bangsa Indonesia*.